

MPRA

Munich Personal RePEc Archive

Economic Challenges in the Digital Era

Ngasuko, Tri Achya

1 March 2018

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/99538/>
MPRA Paper No. 99538, posted 27 Apr 2020 08:43 UTC

Economic Challenges in the Digital Era[¶]

Tri Achya Ngasuko^α

^α Center for Financial Sector Policy, Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance
Jakarta 10710, Indonesia

Correspondence

Tri Achya Ngasuko
Center for Financial Sector Policy, Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance,
Jakarta 10710, Indonesia
Email:
ngasuko@gmail.com

In 2018, the global economic recovery continued. At least this can be seen from the increase in commodity prices, which have a significant effect on production activities such as petroleum, coal, and Crude Palm Oil (CPO). The need for these commodities shows that an increase in global demand is ongoing, which in turn increases commodity prices. Even though some strategic indicators show improvement, it still feels less significant. Our Gini ratio is down, but only very little. Indonesia has started massive infrastructure development as an unremarkable form of policy. In addition to infrastructure, it seems that there is still room for us to do, especially in the era of information technology and the digital era that is developing today. This short paper aims to see what else needs to be done to improve the economy in addition to infrastructure policies that have already been implemented. This brief research shows that several other channels that are likely to contribute to development are the use of the internet. The utilization of the internet will contribute to increasing financial inclusion. A better level of financial inclusion is expected not only to boost growth but also to reduce inequality, as reflected in our expected decreasing ratio. Furthermore, cooperation between various institutions must still be carried out so that coordination runs well.

Keywords: human resource development, life quality, Indonesia

JEL Code: I30, O15, J24

[¶] This paper is a personal opinion and does not represent the policy in which the author works. Most of the contents of this article have been published in the *Warta Fiskal 2nd Edition, 2018*, with the same title.

Tantangan Ekonomi di Era Digital[¶]

Tri Achya Ngasuko^α

^α Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Jakarta 10710, Indonesia

Korespondensi

Tri Achya Ngasuko

Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Jakarta 10710, Indonesia

Email:

ngasuko@gmail.com

Pada tahun 2018, pemulihan ekonomi global berlanjut. Setidaknya hal ini terlihat dari kenaikan harga komoditas yang berpengaruh signifikan terhadap aktivitas produksi seperti minyak bumi, batu bara, dan *Crude Palm Oil* (CPO). Kebutuhan terhadap komoditas ini menunjukkan peningkatan permintaan global sedang berlangsung yang pada akhirnya meningkatkan harga komoditas. Meskipun beberapa indikator strategis menunjukkan perbaikan, namun masih terasa kurang signifikan. Gini ratio kita memang turun, tapi hanya sedikit sekali. Indonesia sudah memulai pembangunan infrastruktur yang masif sebagai bentuk kebijakan yang tidak biasa-biasa saja. Selain infrastruktur, sepertinya masih ada ruang yang bisa kita lakukan, khususnya di era teknologi informasi dan era digital yang berkembang dewasa ini. Tulisan singkat ini bertujuan untuk melihat apalagi yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan perekonomian selain kebijakan infrastruktur yang memang sudah dilaksanakan. Penelitian singkat ini menunjukkan bahwa beberapa saluran lain yang dimungkinkan akan berkontribusi terhadap pembangunan, adalah penggunaan internet. Penggunaan internet akan berkontribusi meningkatkan keuangan inklusif. Level keuangan inklusif yang baik diharapkan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan tetapi juga mengurangi kesenjangan yang tercermin dari gini rasio kita yang diharapkan semakin menurun. Selanjutnya kerja sama antara berbagai institusi tetap harus dilaksanakan agar koordinasi berjalan dengan baik.

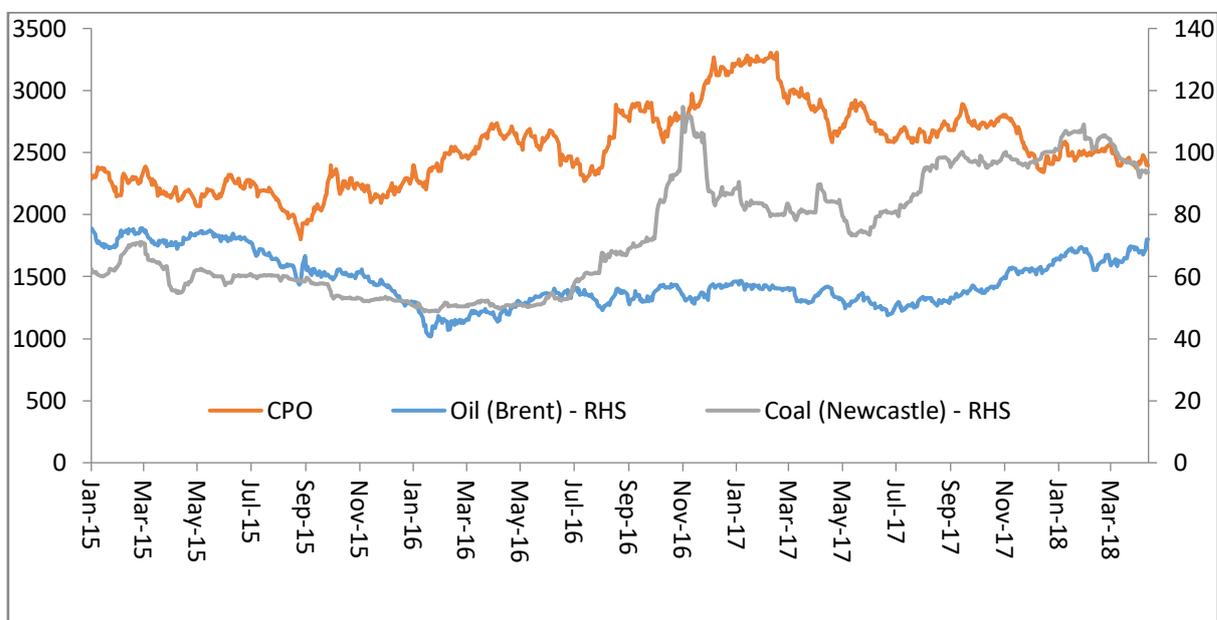
Kata kunci: pembangunan sumber daya manusia, ekonomi digital, Indonesia

Kode JEL: I30, O15, J24

[¶] Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja. Sebagian besar isi artikel ini telah diterbitkan dalam *Warta Fiskal Edisi 2 Tahun 2018* dengan judul yang sama.

Pada tahun 2018, pemulihan ekonomi global berlanjut. Setidaknya hal ini terlihat dari kenaikan harga komoditas yang berpengaruh signifikan terhadap aktivitas produksi seperti minyak bumi, batu bara, dan *Crude Palm Oil* (CPO). Kebutuhan terhadap komoditas ini menunjukkan peningkatan permintaan global sedang berlangsung yang pada akhirnya meningkatkan harga komoditas. Minyak bumi menunjukkan grafik kenaikan harga sejak awal tahun 2016. Setelah menyentuh harga terendah 40,67 dolar AS per barel pada tanggal 20 Januari 2016, harga minyak bumi terus mengalami peningkatan menjadi 72 dolar per barel pada bulan Maret 2018. Bahkan, harga batu bara naik signifikan dalam rentang waktu yang relatif singkat pada semester II tahun 2016. Meskipun akhir-akhir ini terjadi penurunan harga, namun masih relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga sebelum tahun 2016. Hal yang relatif sama terlihat pada harga komoditi CPO.

Tabel 1 : Perubahan Harga Komoditi



Sumber : Bloomberg, 2018

Namun demikian, kondisi ekonomi global yang terus membaik ini harus tetap diwaspai, salah satunya adalah *inward oriented trade policy* dari Amerika Serikat. Sebagaimana kita ketahui, Amerika berencana menaikkan tarif atas berbagai komoditas dari China. Hal ini diakibatkan oleh kondisi neraca perdagangan Amerika yang terus defisit terhadap China. Kondisi inipun direspon dengan perang tarif dari China. Beberapa pengamat dan ekonom menyatakan bahwa kondisi tersebut tidak akan banyak berpengaruh kepada Indonesia. Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, berpandangan bahwa apa yang diimpor dan diekspor kedua negara tersebut belum tentu barang yang sama dengan barang yang diimpor dan diekspor Indonesia. Sebagai catatan, neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika

selalu menunjukkan hasil yang positif. BPS mencatat pada medio Januari sampai dengan Oktober 2017, Indonesia mengalami surplus 7,9 miliar dolar AS. Sebaliknya, dalam kurun waktu yang sama negara perdagangan kita dengan China menunjukkan defisit 11,07 miliar dolar AS. Selanjutnya, hal yang perlu diwaspadai adalah resiko stabilitas keuangan kita karena The Fed akan secara bertahap menaikkan suku bunga mengingat adanya pemulihan global yang terjadi.

Terlepas dari itu semua, Bank Dunia dalam *Global Economic Prospects* pada bulan Januari memprediksi pertumbuhan dunia akan mencapai 3,1%. Negara maju akan mengalami pertumbuhan 2,2% sedangkan negara berkembang akan mengalami pertumbuhan 4,5%. Bagaimana Indonesia menyikapi ini semua? BPS menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia naik 5,07% di tahun 2017 dari 5,03% di tahun 2016. Jumlah penduduk miskin juga turun dari 28,6 juta orang pada tahun 2013 menjadi 26,58 juta orang di tahun 2017. Pengangguran juga turun dari 7,41 juta orang di tahun 2013 menjadi 7,04 juta orang di tahun 2017. Ketimpangan sosial yang ditunjukkan dari gini ratio juga turun dari 0,406 di tahun 2013 menjadi 0,391 di tahun 2017. Meskipun beberapa indikator strategis menunjukkan perbaikan, namun masih terasa kurang signifikan. Gini ratio kita memang turun, tapi hanya sedikit sekali. Gini ratio di 2017 terasa kurang menggembirakan apabila kita jauh melihat ke belakang di tahun 2002 dimana saat itu gini ratio kita di angka 0,341. Bahkan sejak 2012, gini ratio kita relatif stagnan.

Sebuah terobosan perlu dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya meningkatkan indikator strategis di atas. Papanek, Pardede, dan Nazara (2014) menyatakan bahwa apabila Pemerintah menempuh kebijakan yang biasa maka hanya akan mendapatkan 5% pertumbuhan saja dengan 1 juta pekerjaan layak setiap tahun. Namun apabila terobosan kebijakan yang tepat dan reformasi yang tegas diambil, maka Indonesia akan mendapatkan 10% pertumbuhan setiap tahun dan 4 juta pekerjaan baru yang layak setiap tahun. Indonesia sudah memulai pembangunan infrastruktur yang masif sebagai bentuk kebijakan yang tidak biasa-biasa saja. Selain infrastruktur, sepertinya masih ada ruang yang bisa kita lakukan, khususnya di era teknologi informasi dan era digital yang berkembang dewasa ini.

Mendekatkan Produk Perbankan ke Masyarakat

Data Statistik Ekonomi dan Keuangan (SEKI) Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada Februari 2018 dana tabungan masyarakat yang terkumpul adalah 4.410 triliun. Angka ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan data tahun 2010 sebanyak 1.969 triliun. Angka ini terlihat signifikan, namun ternyata hanya sebagian kecil saja dari masyarakat yang mempunyai akses terhadap layanan jasa keuangan formal. Hal ini sering kita kenal sebagai keuangan inklusif, yaitu banyaknya masyarakat yang memanfaatkan layanan jasa keuangan formal. World Bank pernah merilis hasil penelitiannya bahwa di tahun 2010, hanya terdapat dua diantara sepuluh penduduk Indonesia yang mempunyai akses ke

perbankan. Survei serupa di tahun 2015 menunjukkan bahwa penduduk yang mempunyai akses ke lembaga keuangan formal meningkat menjadi 36%. Kabarnya, World Bank berencana merilis studi serupa pada bulan April 2018 untuk melihat perkembangan keuangan inklusif di Indonesia. Hal ini patut kita nantikan hasilnya.

Ketimpangan sosial sangat kompleks penyebabnya. Salah satunya adalah rendahnya akses kepada layanan keuangan formal, dalam hal ini perbankan. Di tahun 2019, Presiden Joko Widodo menginginkan adanya peningkatan keuangan inklusif sampai dengan 75%. Keuangan inklusif menjadi penting karena rendahnya akses ke lembaga keuangan formal menyebabkan susah masyarakat dalam melakukan pemupukan aset (menabung) sehingga pendapatannya hanya akan habis untuk dikonsumsi saja. Mc Kinnon dalam Sharma (2016) menambahkan bahwa aliran dana yang efisien yang disalurkan oleh sistem keuangan yang sehat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Internet yang semakin menjangkau pelosok negeri patut dilirik untuk digunakan sebagai sarana peningkatan keuangan inklusif.

Keuangan inklusif menjadi penting. Namun demikian, ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat enggan melangkahkan kaki ke layanan jasa keuangan formal. Salah satunya adalah jauhnya jarak antara rumah dengan bank. Di era digital yang ditandai dengan gencarnya pemanfaatan internet, kendala ini sepertinya dapat segera terselesaikan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) pada bulan November 2014. Padanan Laku Pandai di negara lain kita kenal dengan *branchless banking*, yaitu layanan bank tanpa kantor. Yang membedakan Laku Pandai dengan bank pada umumnya adalah bahwa masyarakat tidak perlu mendatangi kantor cabang bank tertentu namun cukup dengan mengunjungi agen Laku Pandai dari bank tertentu yang berada tidak jauh dengan lokasi dimana ia tinggal. Produk perbankan yang dilayani oleh agen bank antara lain tabungan dengan karakteristik *basic saving account* dan kredit mikro. Tentunya agen melayani para nasabahnya dengan bantuan sarana internet yang menghubungkan lokasi dimana ia tinggal dengan kantor bank. Langkah ini bagus dan menunjang keuangan inklusif. Paling tidak program ini akan memperkenalkan aktivitas dan kegiatan perbankan dengan masyarakat yang belum memanfaatkan jasa perbankan.

Kegiatan keuangan inklusif lainnya adalah Layanan Keuangan Digital (LKD). Hal ini diatur oleh otoritas sistem pembayaran, yaitu Bank Indonesia. LKD diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Salah satu yang menjadi perhatian dari peraturan terbaru ini adalah tentang bank penyedia layanan LKD. Sebelumnya, bank penyedia LKD hanyalah bank umum yang masuk dalam kelompok Bank BUKU IV. Di peraturan terbaru ini penyedia layanan LKD diperluas

menjadi Bank Umum kelompok BUKU III dan BUKU IV serta Bank Pembangunan Daerah kategori BUKU I dan BUKU II yang memiliki sistem teknologi informasi yang memadai, serta mendapatkan mandat dalam penyaluran program bantuan sosial. Dengan memperluas kelompok bank umum yang dapat memberikan layanan LKD diharapkan makin banyak bank yang mengambil peran dalam pelayanan kepada masyarakat yang lebih luas. Khusus dalam penyaluran program bantuan sosial, Pemerintah memang membidik kepada masyarakat penerima bantuan untuk mencoba memperkenalkan produk perbankan, salah satunya LKD, sebagai sarana literasi perbankan.

Sebagian dari kita masih kurang memahami dimana letak perbedaan Laku Pandai dan LKD. LKD pada intinya membantu masyarakat untuk bertransaksi menggunakan uang tunai seminimal mungkin. Beberapa produk LKD adalah BRI Brizzi, Mandiri E-Money, BCA Flazz, BNI TapCash, dan lain-lain. Mereka menggunakan LKD semata-mata untuk mempermudah transaksi pembayaran sehari-hari seperti pembayaran tiket transportasi umum, belanja, tol, dan lain-lain. Sedangkan Laku Pandai berusaha untuk lebih mendekatkan bank kepada masyarakat. Produk Laku Pandai antara lain BRI Link, BTPN Wow!, Mandiri TabunganMu, BCA Laku, dan lain-lain. Pada bulan April 2018, LPEM UI merilis penelitian tentang LKD dan Laku Pandai yang dilakukan terhadap 1038 orang sampel di sembilan propinsi yang menyatakan bahwa hanya tiga dari sepuluh orang merupakan pengguna aktif LKD, sedangkan sisanya adalah pengguna Laku Pandai. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa masyarakat yang memakai LKD relatif lebih *banked* daripada pengguna Laku Pandai, dimana telah kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia yang *banked* hanya 36% (World Bank, 2015). Sehingga upaya mendekatkan bank kepada masyarakat melalui program Laku Pandai memang dirasa lebih efektif. Sebagai tambahan informasi, sampai dengan Desember 2017 sudah terdapat 740.121 agen Laku Pandai di 34 propinsi yang melayani 13.645.396 orang. Bank Penyedia Laku Pandai juga meningkat dari hanya enam bank saja di tahun 2015 menjadi 25 bank umum, dua bank syariah dan empat BPD yaitu BPD Jambi, BPD Bali, BPD Bengkulu, dan BPD Kalbar.

Aktivitas Ekonomi di Era Digital

Penetrasi penggunaan internet di Indonesia sedemikian tinggi. Survei dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2017 menyatakan bahwa penetrasi pengguna internet mencapai 143,26 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia sebanyak 262 juta orang. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 132,7 juta jiwa. Angka ini diprediksi semakin meningkat seiring selesainya infrastruktur pendukung internet. Sayangnya, penggunaan internet untuk layanan akses perbankan masih sangat kecil, yaitu 7,39%. Layanan akses internet tertinggi adalah untuk *chatting* dan *sosial media* (89,35% dan 87,13%). Penggunaan internet untuk mengakses jasa perbankan semakin menguatkan kita akan fenomena kecilnya level keuangan inklusif kita. Seandainya keuangan inklusif kita tinggi, penggunaan internet untuk mengakses perbankan seperti ini juga akan meningkat.

Namun demikian, internet telah mengubah perilaku seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas di beberapa bidang seperti ekonomi, pelayanan publik, gaya hidup, kesehatan, dan sosial politik. Bahkan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak pun sudah terbiasa kita lakukan melalui online. Pada dasarnya, kita dapat melakukan hampir segalanya secara online. Khusus untuk bidang ekonomi, kita semakin terbiasa membandingkan harga barang secara online, mencari barang, sampai pada akhirnya melakukan jual beli online, termasuk didalamnya adalah melakukan transaksi pembayaran secara nontunai atas penggunaan transportasi online. Kehadiran transportasi online (seperti GoJek, Grabbike, dll) ada karena kemajuan teknologi informasi yang tidak lepas dari semakin terjangkau biaya internet. Hadirnya internet membuat terbentuknya suatu komunitas baru yang melek teknologi sehingga ada potensi ekonomi disana.

Kajian dari Lembaga Demografi FEB UI menyatakan bahwa salah satu penyedia transportasi online, yaitu GoJek berkontribusi terhadap perekonomian dan masyarakat. GoJek berkontribusi 8,2 triliun rupiah per tahun ke dalam perekonomian Indonesia melalui penghasilan para mitra pengemudi. GoJek juga berkontribusi 1,7 triliun rupiah ke dalam perekonomian Indonesia melalui penghasilan mitra UMKM. Di sisi lain, mitra pengemudi GoJek menganggap bahwa hadirnya GoJek mengurangi pengangguran dan memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan penghasilan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Di bidang UMKM, GoJek juga dianggap mampu meningkatkan volume transaksi mitra UMKM karena terbukanya akses pasar baru. Nadiem Makarim, CEO GoJek, dalam suatu seminar di Kementerian Keuangan pada Oktober 2017 lalu mengklaim bahwa GoJek yang sudah beroperasi di lebih dari 50 kota di Indonesia berperan dalam peningkatan keuangan inklusif di Indonesia. Hal ini dikarenakan GoJek mendorong para konsumen untuk menggunakan *cashless payment* yang pada akhirnya uang akan ditransfer melalui rekening bank para mitra pengemudi. Angka tersebut sangat fantastis yang mungkin tidak terpikirkan oleh banyak kalangan sebelumnya. Angka tersebut berpotensi untuk lebih besar karena Grab Bike selaku perusahaan sejenis yang menjadi rival GoJek belum dimasukkan dalam objek penelitian.

Satu hal yang tidak bisa dikesampingkan dari hadirnya internet adalah maraknya perusahaan *startup* di bidang *financial technology (fintech)*, khususnya layanan pinjam-meminjam uang dengan memanfaatkan teknologi atau *Peer to Peer Lending (P2P)*. Keengganan masyarakat untuk pergi ke bank untuk mendapatkan kredit dari bank rupanya menjadi peluang perusahaan *fintech*. Jenis perusahaan ini masih relatif baru sehingga OJK selaku otoritas pengawas perbankan segera mengeluarkan peraturan terkait, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Dengan adanya regulasi ini diharapkan P2P dapat bertumbuh dan bisa jadi alternatif sumber pembiayaan baru bagi masyarakat. Disisi lain, peraturan tersebut hadir untuk melindungi konsumen, seperti kerahasiaan data, dan untuk kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan

stabilitas sistem keuangan. Sampai dengan bulan Maret 2018, terdapat sebanyak 40 perusahaan penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis *fintech* yang telah resmi terdaftar dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Jenis *fintech* lainnya yang juga cukup menyita perhatian adalah *e-commerce*. Dengan adanya internet, berbagai aktivitas *e-commerce* dilakukan, antara lain mencari produk online, mengunjungi toko online dan pada akhirnya membeli produk online. Ignatius Untung dari Asosiasi E-commerce Indonesia (Indonesian E-commerce Assosiation/ IdEA) dalam seminar di Kementerian Keuangan pada bulan Oktober 2017 mencatat bahwa pada tahun 2016 terdapat 24,74 juta orang yang berbelanja melalui online dengan nilai transaksi 5,6 milyar dolar, atau setara 72,8 triliun rupiah. Beliau juga menambahkan bahwa nilai transaksi tersebut masih kurang dari 2% apabila dibandingkan dengan transaksi retail total. Dengan demikian, *e-commerce* di Indonesia memang masih belum mencapai puncaknya. Pemerintah tidak tinggal diam untuk mengantisipasi potensi dari *e-commerce*. Pemerintah sadar bahwa ekonomi berbasis elektronik mempunyai potensi ekonomi yang tinggi bagi Indonesia dan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan berbasis Elektronik (*Roadmap E-commerce*) 2017-2019 pada tanggal 21 Juli 2017. Peta jalan ini berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan sektoral dan rencana tindak dalam rangka percepatan pelaksanaan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik. Selain itu, peta jalan ini juga berfungsi sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam menjalankan kegiatan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik.

Kesimpulan

Pemerintah mencoba memanfaatkan semua saluran untuk meningkatkan pertumbuhan setiap tahunnya. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bendungan memang akan berdampak terhadap pertumbuhan. Akan tetapi, terdapat beberapa saluran lain yang dimungkinkan akan berkontribusi terhadap pembangunan, yaitu penggunaan internet dalam rangka meningkatkan keuangan inklusif. Level keuangan inklusif yang baik diharapkan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan tetapi juga mengurangi kesenjangan yang tercermin dari gini rasio kita yang diharapkan semakin menurun.

Pemerintah juga tidak menutup mata atas kegiatan ekonomi lain yang memanfaatkan kehadiran internet seperti transportasi online ataupun aktivitas *e-commerce* sehingga kehadiran Pemerintah dalam bentuk peraturan bertujuan tidak lain untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen. Selanjutnya kerja sama antara berbagai institusi tetap harus dilaksanakan agar koordinasi berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- G.F.Papanek, Raden Pardede, Suahasil Nazara. 2014. Pilihan Ekonomi yang Dihadapi Presiden Baru. Pelangi Grafika. Jakarta
- OJK (2015) Seputar Informasi LAKU PANDAI, Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan. <https://www.ojk.go.id/Files/box/laku-pandai/buku-saku.pdf>
- Sharma, D. (2016). Nexus between financial inclusion and economic growth: evidence from the emerging Indian economy. *Journal of Financial Economic Policy*, 8(1), 13–36. <https://doi.org/10.1108/JFEP-01-2015-0004>
- World Bank. (2015). The Little Data Book on Financial Inclusion. PhD Proposal (Vol. 1). Washington. <http://doi.org/10.1596/978-1-4648-0552-3>
- World Bank. (2018). Global Economic Prospects: Broad Based Upturn, but for How Long?. World Bank Group. DOI: 10.1596/978-1-4648-1163-0

Peraturan

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/ 17 /PBI/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)
- Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan berbasis Elektronik (*Roadmap E-commerce*) 2017-2019
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Bahan Seminar

- Makarim. 2017. Bahan Seminar : Ekonomi Kerakyatan melalui Digital (GoJek)
- Untung. 2017. Bahan Seminar : Lanskap Ecommerce Indonesia
- Wisana, dkk. 2018. Bahan Seminar : Dampak GoJek terhadap Perekonomian Indonesia. Lembaga Demografi, FEB Universitas Indonesia.

Situs

- <https://www.antaraneews.com/berita/664970/neraca-perdagangan-indonesia-surplus-900-juta-dolar-amerika-serikat>
- <https://industri.kontan.co.id/news/ekonom-perang-tarif-impor-as-china-tak-akan-berdampak-ke-industri-di-indonesia>
- <https://www.ojk.go.id/id/Pages/Laku-Pandai.aspx>
- <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Maret-2018.aspx>